

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi pada masyarakat tidak terlepas dari pengaruh perusahaan yang menimbulkan dampak dari aktivitas atau operasi perusahaan. Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang dalam perbuatan hukum diwakili oleh organ atau pengurusnya, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan kekhilafan dan kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan diantaranya tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis yang dikembangkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Suharto, 2017).

Dewasa ini sedang berkembang sebuah konsep bahwa dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan tidak hanya mengejar laba, namun juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan etika, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta kualitas masyarakat. Terdapat pertentangan dalam pelaksanaan konsep tanggung jawab sosial ini, dimana tanggung jawab sosial ini bersifat sukarela namun juga wajib dilaksanakan atau disebut juga *contradiction in terminis* yaitu keduanya merupakan istilah yang bertentangan (Kartini, 2013).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sekumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat dimana organisasi tersebut berada (Khoirudin, 2015). Dalam pelaksanaannya, CSR memiliki cakupan yang luas yaitu terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kemudian pelaksanaan CSR dalam perusahaan meliputi tiga aspek yang menjadi dasar pelaksanaannya,

yaitu *people*, *planet*, dan *profit*. Ketiga aspek tersebut dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (Kartini, 2013).

Tanggung jawab sosial oleh perusahaan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 bahwa perusahaan atau perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, dimana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan juga dijelaskan dalam ISO 26000 untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan CSR secara relevan dan efektif. Panduan ini dapat dikorelasikan dan disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan untuk menjalankan operasional dan proses didalamnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program yang dijalankan. ISO 26000 memuat 7 subjek inti dari penerapan tanggung jawab sosial yang dapat disesuaikan dengan analisis kebutuhan perusahaan. Subjek-subjek tersebut yaitu 1) Tata Kelola Organisasi, 2) Hak Asasi Manusia, 3) Ketenagakerjaan, 4) Lingkungan, 5) Praktik Kegiatan Industri yang Sehat, 6) Konsumen, dan 7) Pengembangan Masyarakat. Panduan ini tidak hanya dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak korporat namun juga dapat digunakan oleh organisasi lain.

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dimana dalam pelaksanaannya dapat berangkat dari potensi yang ada pada masyarakat maupun diarahkan kepada kelompok masyarakat yang rentan mendapatkan pengaruh operasi perusahaan, khususnya kelompok masyarakat yang mengalami masalah. Kalau tidak secara khusus perusahaan membuat kelompok ini menjadi sasaran, maka ketimpangan akan semakin terjadi dan dis-harmoni hubungan pasti akan terjadi suatu saat (Kartini, 2013). Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk implementasi yang paling penting mengingat masih banyaknya kelompok masyarakat rentan di Indonesia yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak salah satunya perusahaan (Kartini, 2013). Pemberdayaan masyarakat memiliki cakupan yang spesifik, berbeda dengan CSR yang memiliki cakupan sangat luas meliputi seluruh pemangku kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari CSR.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan sekaligus cerminan adanya keinginan untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan baik dari segi ekonomi, pengetahuan maupun sosial. Pelaksanaan pemberdayaan yang merupakan salah satu metode pekerja sosial menunjuk pada interaksi aktif antara pelaku pemberdayaan dengan masyarakat dimana masyarakat juga dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program (Suharto, 2017).

Mardikanto dan Soebianto (2019) mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari penciptaan suasana atau iklim yang

memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dan dalam proses pemberdayaan harus dicegah terjadinya situasi dimana yang lemah menjadi bertambah lemah, dikarenakan kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang umum terjadi dalam pemberdayaan seperti kurangnya perencanaan dalam penyusunan program, minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan rendahnya motivasi untuk mengikuti program, adanya penolakan pihak tertentu, dan kurang terjalinnya hubungan antar pelaksana pemberdayaan.

Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah hal yang penting dalam pembangunan dan konsep pemberdayaan sebagai sebuah strategi sudah diterima dengan baik, namun masih terdapat dilema seperti upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak berhadapan dengan kenyataan yang pasti, luputnya perhatian terkait substansi dari tujuan pemberdayaan, upaya pemberian bantuan tidak menjawab masalah keberdayaan, keberlanjutan program atau kegiatan yang lambat bergerak, kecenderungan masyarakat dalam memilih bantuan secara ekonomi, adanya dominansi, isu globalisasi dan ketidaksesuaian terhadap konsep yang telah dirancang.

Pelaksanaan pemberdayaan harus memperhatikan konsep atau strategi agar pelaksanaan pemberdayaan dapat terhindar dari hambatan-hambatan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu konsep yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan yaitu terkait elemen-elemen

yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Narayan (2002) mengungkapkan terdapat empat elemen kunci yang harus ada dalam pemberdayaan masyarakat yaitu akses terhadap informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal.

Salah satu perusahaan yang melaksanakan CSR ialah PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang. PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang merupakan anak perusahaan Aqua Danone yang bergerak pada industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). PT Tirta Investama (Aqua) Plant Subang bekerjasama dengan NGO bernama Human Initiative untuk merintis program pemberdayaan menggunakan model *Economy Development Program* (ECODEV) dan fokus pada tiga pilar prioritas yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Program ECODEV merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang yang berfokus pada pengembangan bisnis dan tata kelola layanan koperasi, pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pertanian Sehat, serta pengembangan ekowisata berkelanjutan. Program ECODEV dilaksanakan di tiga tempat, salah satunya di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang dengan program yang dilaksanakan yaitu program Pertanian Sehat.

Program Pertanian Sehat merupakan sebuah upaya peningkatan kesejahteraan bagi petani melalui perubahan konsep pertanian yang meremajakan (*Regenerative Agriculture*) dengan menekan penggunaan bahan-bahan kimia dalam aktivitas pertanian. Pertanian Sehat ini dapat mengurangi beban pengeluaran petani dengan biaya produksi yang lebih murah melalui penggunaan pupuk dan

pestisida organik. Selain itu Pertanian Sehat ini akan menghasilkan *output* berupa produk organik (beras dan pupuk) dengan harga jual lebih tinggi hingga 2 kali lipat. Melalui peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pula penghasilan petani yang pada akhirnya akan tercipta peningkatan taraf kesejahteraan bagi petani.

Pelaksanaan program ini menggunakan metode berupa Pembelajaran dan Partisipasi (*Participatory Learning and Action / PLA*). Metode ini mendorong terciptanya keterlibatan yang lebih besar oleh para petani karena analisis dan penentuan kebutuhan serta pengambilan keputusan dalam program tersebut dilaksanakan bersama-sama. Pelaksanaan program Pertanian Sehat ini menggunakan pendekatan partisipatif yang ditekankan pada aspek objek yaitu aktivitas pertanian oleh para petani, aspek kebutuhan yang merupakan penunjang keberlangsungan program, dan aspek pelaku yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Pertanian Sehat ini.

Pada tahun 2021 proses pendampingan program Pertanian Sehat difokuskan kepada kelompok tani Karya Mukti dan Kelompok Organik Mandiri (KOM) di Desa Pasanggrahan. Pendampingan tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 namun terhenti karena rendahnya partisipasi petani dan pendampingan tersebut dilaksanakan kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan perencanaan program jangka panjang terkait program Pertanian Sehat dan diharapkan dapat menjadikan petani di Desa Pasanggrahan mandiri mulai dari penyediaan pupuk, penyediaan bibit, mandiri teknologi dan dapat mengembangkan pemasaran dari hasil pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program

tersebut diantaranya *assessment* potensi petani lokal desa Pasanggrahan, Workshop sekolah lapangan Pertanian Sehat, demplot pertanian sehat, bantuan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO), pengenalan teknologi *Drone* untuk mekanisme pertanian, dan studi banding program Pertanian Sehat. Terciptalah demplot (*Demonstration Plot*) pertanian seluas 4 Ha dengan tujuan untuk memperlihatkan keseluruhan proses dari praktik pertanian sehat kepada petani di Desa Pasanggrahan.

Bagi PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang, pelaksanaan program Pertanian Sehat ini merupakan sebuah upaya peningkatan kesejahteraan bagi para petani Desa Pasanggrahan. Terdapat 40 petani dari Desa Pasanggrahan (Kelompok Tani Karya Mukti) yang menjadi penerima manfaat program Pertanian Sehat dengan mayoritas petani tersebut memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar. Rata-rata petani tersebut tergolong sebagai fakir miskin (berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012) yang memiliki penghasilan rata-rata Rp.50.000 /hari atau Rp.1.500.000 /bulan. Dengan jumlah penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari dan tidak jarang para petani harus melakukan “gali lubang tutup lubang” untuk menutupi kerugian ketika terjadi gagal panen. Selain itu, beban ganda dialami oleh petani yang tidak memiliki lahan dimana mereka melakukan aktivitas bercocok tanam dengan menyewa lahan kepada petani atau pemilik lahan yang lain. Hal ini tentunya menambah beban petani dalam melakukan aktivitas pengolahan lahan, dimana penghasilan yang didapat menjadi lebih rendah dan terkuras untuk digunakan sebagai modal atau biaya produksi.

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menjadikan upaya peningkatan kesejahteraan bagi para petani belum terlaksana secara maksimal. Hambatan yang terjadi yaitu terbatasnya kapasitas petani terkait pengelolaan hasil dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada. Selain itu juga terdapat kendala dalam pelaksanaan program berkaitan dengan proses pendampingan dimana terdapat pergantian pendamping yang berdampak pada terganggunya komunikasi antara petani dengan pemberi program sehingga upaya pencapaian tujuan menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus di PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang)” untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terkait elemen-elemen kunci pemberdayaan yang dilakukan dalam program Pertanian Sehat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang?”. Selanjutnya rumusan masalah diatas dijelaskan kembali melalui sub-problematik berikut:

1. Bagaimana akses terhadap informasi yang diterima oleh Petani dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?
2. Bagaimana inklusi dan partisipasi Petani dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?
3. Bagaimana akuntabilitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?
4. Bagaimana kapasitas yang dimiliki Petani dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus di PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang adalah untuk mengkaji dan memperoleh gambaran tentang:

1. Akses terhadap informasi yang dilakukan Petani dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.
2. Inklusi dan partisipasi Petani dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

3. Akuntabilitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.
4. Kapasitas yang dimiliki Petani dalam Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus di PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang) diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun secara praktik.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pikiran terkait konsep pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu wujud tanggungjawab sosial perusahaan di dunia pekerjaan sosial industri. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam kegiatan penelitian bidang kesejahteraan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan masukan terkait strategi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dunia industri, khususnya kepada PT. Tirta Investama (Aqua) Plant Subang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian tedahulu, teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, dan jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi Pertanian Sehat Desa Pasanggrahan, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelakasana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya program, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memut tentang kesimpulan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian serta saran yang ditujukan untuk mengantisipasi kelemahan dan ancaman program pemecahan masalah.